

## **Abstrak**

Sengketa letak batas tanah adalah perubahan tata letak bidang tanah yang disebabkan adanya pemisahan, pengurangan dan penggabungan luas tanah yang tidak sesuai dengan data yang sah. Sengketa batas dalam lingkungan masyarakat cenderung dibiarkan berlarut-larut, karena masyarakat tidak mempersoalkan permasalahan sengketa batas. Padahal permasalahan sengketa batas, walaupun hanya beberapan luas yang diambil alih tetapi bisa mengakibatkan permasalahan di masa yang akan datang. Maka dari itu metode pengukuran ulang adalah pengukuran untuk mengembalikan batas tanah seperti semula yang disebabkan karena penggesaran, pemisahan, penggabungan dan termasuk sengketa batas tanah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengukuran ulang tanah sebagai penyelesaian sengketa batas kepemilikan tanah di Kabupaten Blora dan untuk mengetahui apa yang menjadi dan bagaimana solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pengukuran ulang tanah sebagai penyelesaian sengketa batas kepemilikan tanah di Kabupaten Blora.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis yang didukung dengan data primer dan data sekunder. Pengumpulan metode data menggunakan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan Analisa data dengan menggunakan analisis Deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran keadaan atau fenomena berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, prosedur pengajuan pengukuran ulang tanah dalam sengketa batas tanah adalah melalui pengaduan, selanjutnya ke kepala kantor diteruskan ke kepala saksi konflik, sengketa dan perkara, selanjutnya ke kepala subseksi konflik, sengketa dan perkara, cara mencari sengketa letak batas tanah. Kedua, kendala internal yaitu sumber daya manusia dengan memberikan pengetahuan kepada pegawai kantor pertanahan kabupaten Blora, keterbasatan anggaran dengan memberikan tamabahn bantuan anggran, sarana dan prasarana dengan memberikan alat yang dapat menunjang mempercepat penyelesaian sengketa batas tanah. Sedangkan kendala eksternal yaitu masalah kesdaran masyarakat dengan memberikan sosialis dari Kantor Pertanahan kabupaten Blora.

Kata Kunci : *Pengukuran Ulang, sengketa batas tanah*

## ***ABSTRACT***

Land boundary disputes are changes in the layout of land parcels caused by the separation, reduction and merging of land areas that are not in accordance with valid data. Border disputes in the community environment tend to be allowed to drag on, because the community does not question the issue of boundary disputes. Whereas the problem of boundary disputes, even though only a few broad areas were taken over, can cause problems in the future. Therefore the method of re-measurement is a measurement to restore the original land boundary caused by enlargement, separation, merging and including land boundary disputes.

The purpose of this study was to determine the procedures for re-measuring land as a settlement of land ownership boundary disputes in Bloro District and to find out what happened and how the solutions faced in the implementation of land re-measurement procedures as resolving land ownership boundary disputes in Bloro Regency.

The research method used is a research method with a sociological juridical approach supported by primary and secondary data. The collection of data methods uses the study of literature, observation, and interviews. After the data is collected, data analysis is performed using qualitative descriptive analysis to obtain a picture of the situation or phenomenon based on the facts that appear.

The results of this study indicate that: first, the procedure for submitting land remeasurement in land boundary disputes is through complaints, then to the head of the office forwarded to the head of witnesses to conflicts, disputes and cases, then to the head of conflict subsections, disputes and cases, how to find disputes about the boundary location soil. Second, internal constraints, namely human resources by providing knowledge to employees of the Bloro district land office, budget constraints by providing budget assistance, facilities and infrastructure by providing tools that can support accelerating the resolution of land boundary disputes. While the external obstacle is the issue of community awareness by providing socialists from the Bloro District Land Office.

*Keywords: Re-Measurement, land boundary dispute*